

BAB III

MANIFESTASI *TRIANON SYNDROME* DALAM PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI HUNGARIA TERHADAP UKRAINA

Perubahan kebijakan luar negeri Hungaria terhadap Ukraina pada invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 termanifestasi melalui tindakan-tindakan yang dilakukan Hungaria dalam menyikapi konflik tersebut. Dalam beberapa kesempatan, Hungaria di bawah kepemimpinan Viktor Orbán menyatakan dukungannya kepada Ukraina dengan menerima pengungsi Ukraina serta memberikan bantuan kemanusiaan terbesar sepanjang sejarah Hungaria, tetapi di lain sisi Hungaria menjalin hubungan dengan Rusia hingga memveto bantuan Uni Eropa ke Ukraina. Snyder et al (2002) dalam teori *decision-making* menyatakan bahwa perilaku negara tergambar dari subjektivitas pembuat keputusan.

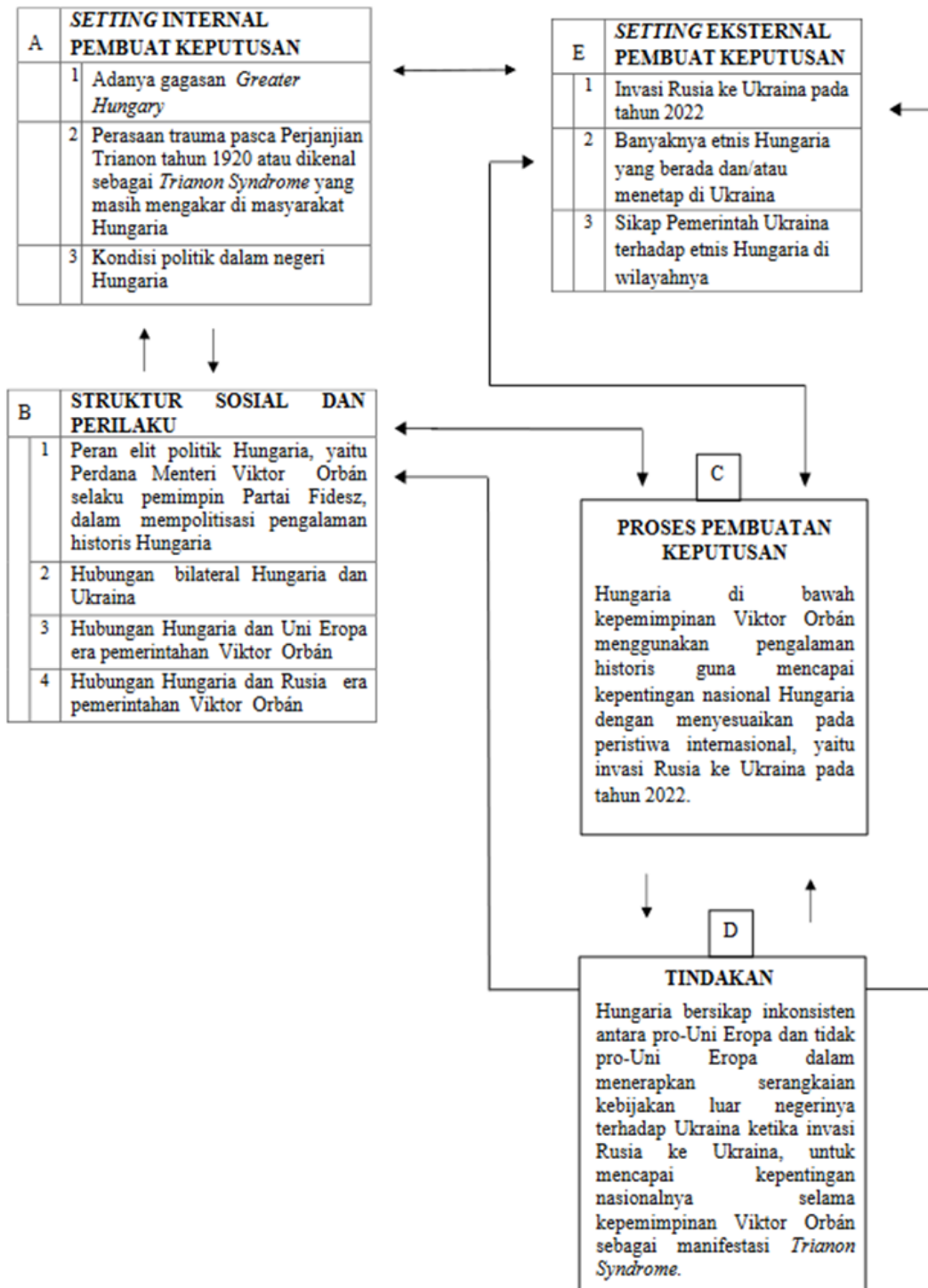
Pada konteks mengenai *decision-making* di atas, maka Perdana Menteri Viktor Orbán dan Partai Fidesz merupakan pembuat keputusan setiap kebijakan yang diambil oleh Hungaria dalam menyikapi konflik Rusia–Ukraina. Subjektivitas para pengambil keputusan turut didasari oleh dua faktor yang disebut sebagai *setting*, yaitu *setting* internal dan eksternal. *Setting* menjadi istilah analitik yang menunjukkan tindakan elit politik berdasarkan tanggapan dari faktor dan situasi yang ada di luar diri mereka serta organisasi pemerintah dimana mereka menjadi bagiannya.

Meskipun terdapat *setting* eksternal, para pembuat keputusan kebijakan Hungaria terhadap Ukraina dominan dipengaruhi oleh adanya *setting* internal. *Setting* internal mengacu pada faktor dan keadaan di luar batas teritorial negara

serta tindakan dan reaksi negara lain terhadap pengambilan keputusan mereka, masyarakat dimana tindakan tersebut terjadi, dan dunia fisik. Sementara itu, *setting* eksternal merupakan cara negara berperilaku terhadap dunia. Cara berperilaku ini berdasarkan pada cara masyarakatnya diatur dan berfungsi dalam karakter serta perilaku masyarakatnya dalam habitat fisiknya.

Tiga aspek utama seperti yang dijelaskan peneliti pada bagian pertama mengindikasikan adanya faktor internal—bersifat domestik—seperti *national trauma*, kepentingan nasional, dan identitas budaya. Hal ini karena segala kebijakan yang dibentuk oleh Hungaria mengacu pada identitas nasional yang terbentuk dari adanya ketiga aspek tersebut sehingga dapat membentuk aksi–reaksi terhadap suatu atau beberapa negara. Hal serupa turut disampaikan oleh Putz (2019) bahwa Trianon masih hadir di Hungaria dan memainkan peran penting dalam pembentukan identitas nasional dan politik di Hungaria hingga saat ini .

Merujuk pada momentum invasi Rusia ke Ukraina, adanya *trianon syndrome* yang mengakar dalam diri bangsa akibat dari para pembuat keputusan yang memproyeksikan *trianon syndrome* secara berkala menjadi alasan utama terjadinya perubahan kebijakan luar negeri Hungaria terhadap Ukraina di bawah Pemerintahan Viktor Orbán. Berikut adalah bagan alur pemikiran para pembuat keputusan sesuai dengan teori *decision-making* oleh Snyder et al (2002).



Gambar 3. 1 Proses Pembuatan Keputusan Perubahan Kebijakan Luar Negeri Hungaria Terhadap Ukraina

Sumber: Olahan Peneliti

Gambar 3.1 tentang proses pembuatan keputusan perubahan kebijakan luar negeri Hungaria terhadap Ukraina menjelaskan bagaimana antarfaktor saling berkaitan satu sama lain dalam membentuk proses pembuatan keputusan yang mendorong adanya tindakan di tingkat negara. Meskipun sudah diketahui secara jelas bahwa terdapat banyak faktor yang memengaruhi keputusan pembuat kebijakan, perlu adanya lensa analitik lainnya untuk mengerucuti satu faktor mendasar—atau utama—dari adanya perubahan kebijakan luar negeri Hungaria terhadap Ukraina. Maka dari itu, peneliti menggunakan *strategic culture* untuk mendapatkan faktor mendasar yang memengaruhi perubahan kebijakan luar negeri Hungaria terhadap Ukraina. Penggunaan *strategic culture* menurut Johnston (1995) melihat faktor-faktor domestik seperti tatanan geopolitik, pengalaman sejarah nasional, budaya politik dan ideologi, serta budaya militer dan hubungannya dengan masyarakat di suatu negara dapat memengaruhi *grand strategy* suatu aktor negara dalam mempertahankan diri dan bagaimana aktor negara tersebut merespons suatu ancaman.

Apabila menilik perspektif lain dalam mengkaji perubahan kebijakan luar negeri Hungaria terhadap Ukraina dalam invasi Rusia ke Ukraina, maka selalu ada celah untuk melihat *research gap* yang kemudian menyakini peneliti untuk menggunakan *strategic culture* sebagai suatu alat analisis yang tepat. Hal ini karena berbagai penelitian yang menggunakan kerangka pemikiran studi Hubungan Internasional lainnya tidak dapat secara mendasar dan mendetail menemukan motivasi di balik tindakan Hungaria. Apabila melihat dengan perspektif realisme, maka sikap Hungaria didasarkan pada strateginya untuk

mempertahankan keamanan dan kedaulatannya, atau dengan kata lain menghindari konflik, di dunia internasional yang anarkis. Namun, realisme tidak dapat menyentuh alasan dibalik adanya urgensi untuk mempertahankan keamanan dan kedaulatan Hungaria yang ternyata turut dipengaruhi oleh aspek non-material.

Tindakan Hungaria yang terlihat pro-Rusia dalam sikap inkonsistensinya dengan Uni Eropa terhadap Ukraina melalui penolakan pemberian sanksi kepada Rusia dan menjalin hubungan kerja sama tidak dapat dijelaskan dengan perspektif realisme. Hal ini karena terdapat *gap* yang tidak dapat dijelaskan oleh realisme, yaitu kehadiran faktor non-material seperti pengalaman historis dan faktor budaya. Apabila hanya demi kepentingan nasional dalam hal ekonomi dan keamanan, Rusia seharusnya didefinisikan sebagai ‘ancaman’ oleh Hungaria, terlebih Hungaria merupakan negara pasifis¹² karena tidak ingin terlibat dalam suatu perang atau konflik bersenjata. Maka dari itu, mengapa Hungaria yang mengklaim tidak ingin ‘terlibat’ dalam perang kemudian menjalin hubungan yang erat dengan pihak yang memulai perang dan konflik? Terdapat hal yang tingkatannya ‘lebih tinggi’ yang mendasari kepentingan nasional tersebut sehingga Hungaria bertindak melampaui batasnya dimana perilaku ini tidak dapat dikaji dengan realisme. Hal ini dapat dikaji dengan melihat pada pengalaman historis menggunakan alat analisis *strategic culture*.

¹² Hungaria yang diwakilkan oleh Perdana Menteri Viktor Orbán dalam beberapa kesempatan mengklaim negaranya ‘tidak akan terlibat dalam perang dan konflik’ atau menjadi pihak ‘netral’ di dunia internasional yang menunjukkan sikap pasifisme. Klaim ini terbukti dengan Hungaria di tahun 2022 menempati urutan ke-13 pada Global Peace Index (Rajcsányi, 2022).

Sementara itu, pemikiran konstruktivisme yang berargumen bahwa sikap inkonsistensi Hungaria didasarkan pada identitas nasionalnya yang kuat beserta nilai-nilai nasionalisme yang dianut negara tersebut masih kurang membuktikan. Peneliti melihat bahwa konstruktivisme tidak dapat menjelaskan mengapa Hungaria memiliki dasar identitas nasional yang kuat yang turut dipengaruhi oleh aspek material. Apabila dikaji dengan pemikiran lainnya, seperti neorealisme, logika yang diberikan adalah bahwa sikap Hungaria didasarkan pada cara negara bertahan hidup atau respons terhadap ancaman dan peluang yang dirasakan dalam sistem internasional, kurang mendalam. Peneliti meyakini bahwa masih terdapat alasan dibalik mengapa Hungaria berusaha keras bersikap ‘kontra’ dalam Uni Eropa sebagai cara bertahan hidup merespons terhadap ancaman, apa yang mendasari definisi negara terhadap ancaman tersebut? Pemikiran lain seperti marxisme yang melihat pada aspek kepentingan ekonomi pun tidak dapat menjawab sikap inkonsistensi Hungaria dalam menanggapi invasi Rusia ke Ukraina melalui kebijakan luar negerinya, meskipun Hungaria dapat dikategorikan bukan sebagai negara kaya dan terdapat hubungan kerja sama ekonomi yang dilakukan antara Hungaria dan Rusia dalam invasi ini.

Snyder et al (2002) menyatakan bahwa dalam mengkaji lebih lanjut proses pengambilan sebuah keputusan, terdapat tiga determinan utama, yaitu *competence*, informasi dan komunikasi, serta motivasi. Perubahan kebijakan luar negeri Hungaria terhadap Ukraina dalam invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022 menggunakan determinan motivasi untuk mengerucuti lebih lanjut mengenai alasan dibalik tindakan perubahan kebijakannya. Hal ini karena motivasi

digunakan untuk mendefinisikan tindakan pengambil keputusan terkait nilai, perilaku, dan kepribadian sebagai pendorong utama kebijakan itu sendiri (Snyder et al., 2002). Dengan kata lain, perilaku aktor sebagai pembuat keputusan, yaitu Perdana Menteri Viktor Orbán dan Partai Fidesz, dapat mendefinisikan bagaimana negara berperilaku. Sementara itu, pengalaman historis Hungaria menjadi *strategic culture* yang memotivasi pembuat keputusan untuk melakukan serangkaian tindakan terhadap negara lain.

Strategic culture tercermin dari adanya serangkaian simbol yang berkembang secara internal sehingga memiliki pengaruh besar pada perumusan strategi suatu negara, seringkali hal ini didasari oleh kecenderungan historis suatu negara untuk mempertahankan lingkup pengaruhnya di kawasan mereka. Dalam konteks ini, *trianon syndrome* di Hungaria sebagai alasan dibalik perubahan kebijakan luar negeri negara tersebut terhadap Ukraina dapat dibuktikan dengan menggunakan kerangka kerja *strategic culture*. Hal ini dilakukan dengan memeriksa bagaimana *trianon syndrome* memengaruhi strategi utama Hungaria ketika mempertahankan diri dalam menanggapi ancaman–ancaman yang diproyeksikan oleh para pembuat keputusan.

Maka dari itu, sub-bab selanjutnya membahas analisis proses pembuatan keputusan perubahan kebijakan luar negeri Hungaria Terhadap Ukraina dengan menggunakan dua lensa analisis teori *decision-making* oleh Snyder et al (2002) dan *strategic culture* oleh Johnston (1995). Penggunaan *strategic culture* diperlukan karena penjelasan hanya dengan menggunakan teori *decision-making* masih sangat umum untuk dapat menjelaskan tindakan Hungaria.

3.1 Proses Pembuatan Keputusan Perubahan Kebijakan Luar Negeri Hungaria Terhadap Ukraina

Pemerintahan Viktor Orbán dan Partai Fidesz memberikan dampak signifikan terhadap bagaimana Hungaria bertindak di dunia internasional. Selama masa pemerintahan Viktor Orbán sejak tahun 2010, Hungaria dinilai cenderung mengkhianati nilai-nilai Eropa sehingga membentuk suatu sikap *euroscepticism*¹³ melalui berbagai kebijakannya, salah satu yang terkenal adalah kebijakan anti-imigran yang dikeluarkan sejak adanya lonjakan pengungsi akibat *Arab's spring*. Serangkaian perubahan kebijakan luar negeri Hungaria ke Ukraina ditandai dengan adanya sikap Hungaria yang menerima pengungsi Ukraina di wilayahnya, tetapi di sisi lain memveto bantuan yang diberikan oleh Uni Eropa ke negara tersebut. Menurut Snyder et al (2002), negara merupakan pengambil keputusan resmi dimana tindakan negara merupakan tindakan yang diambil oleh 'mereka' atau aktor yang bertindak atas nama negara. Mereka yang bertindak atas nama negara, atau dengan kata lain para pembuat keputusan, menciptakan kembali 'dunia' dari sudut pandang mereka sebagaimana mereka memandang hal tersebut.

Perdana menteri Viktor Orbán dan Partai Fidesz merupakan pembuat keputusan yang berhasil membangun definisi suatu situasi, kemudian memproyeksikan pandangan subjektifnya melalui serangkaian tindakan yang dilakukan. Situasi invasi Rusia dan Ukraina dipandang

¹³ ideologi politik suatu kelompok—biasanya elit politik—dalam negara yang menentang segala kebijakan maupun keputusan yang dibentuk oleh Uni Eropa.

sebagai suatu kesempatan oleh Hungaria. Snyder et al (2002) menjelaskan subjektivitas para aktor pembuat keputusan turut dipengaruhi oleh adanya *setting* internal dan *setting* eksternal. Meskipun kedua *setting* saling memengaruhi tindakan pembuat keputusan, tetapi *setting* internal berperan lebih signifikan dalam mengkaji tindakan Hungaria terhadap Ukraina. *Setting* internal dalam proses pengambilan keputusan perubahan kebijakan luar negeri Hungaria terhadap Ukraina dapat diklasifikasikan dalam tiga aspek utama, yaitu adanya gagasan ‘Greater Hungary’, perasaan trauma pasca Perjanjian Trianon 1920, dan kondisi politik domestik Hungaria. Pada dasarnya, kondisi politik domestik Hungaria turut mencakup etnis Hungaria, baik yang berada di dalam maupun luar teritorial.

Ketiga hal tersebut berakar pada satu variabel utama, yaitu *strategic culture* yang dimiliki oleh Hungaria. Dalam hal ini, *strategic culture* meyakini bahwa strategi besar aktor negara dalam mempertahankan diri serta bagaimana aktor negara mempertahankan diri dari ancaman dipengaruhi oleh berbagai faktor domestik, seperti pengalaman sejarah nasional, tatanan geopolitik, budaya dan ideologi politik, serta budaya militer dan hubungannya dengan masyarakat di suatu negara. Motivasi tindakan suatu negara didukung oleh kecenderungan historis dalam mempertahankan lingkup pengaruhnya. Terlebih dalam konteks ini, terdapat trauma historis yang menurut Mohatt et al (2014) dapat dipahami sebagai tiga elemen utama berikut 1) trauma atau luka; 2) trauma kolektif yang dialami secara bersama oleh sekelompok orang,

bukan dialami perseorangan atau individu; dan 3) trauma yang menjangkau beberapa generasi, sehingga anggota kelompok di masa kini tidak perlu untuk hadir dalam kejadian traumatis tersebut secara langsung untuk dapat mendapatkan gejala trauma.

Merujuk pada bagian elemen ketiga tersebut, setiap negara bertindak di dunia internasional membawa beban sejarah yang merupakan akumulasi dari pengalaman, kepercayaan, pengaruh budaya, serta keterbatasan geografis dan material. Beban sejarah tersebut kemudian berdampak pada perilaku suatu negara hingga pada generasi saat ini. Hungaria menganggap invasi Rusia ke Ukraina sebagai sebuah kesempatan karena perang tersebut menjadi ‘ancaman’ bagi kepentingan nasional Hungaria, tetapi di lain sisi turut menjadi ‘peluang’ bagi kepentingan nasional negaranya. Anggapan ini diproyeksikan oleh elit para pembuat keputusan kepada masyarakat luas. Pemerintahan Viktor Orbán berhasil meningkatkan perasaan *victimhood* atau korban dalam Perjanjian Trianon

Terdapat dua metode yang digunakan untuk menganalisis *strategic culture* suatu negara menurut Johnston (1995), yaitu pemetaan kognitif dan analisis simbol. Pemetaan kognitif digunakan untuk mengungkapkan hubungan antara aksioma kausal tertentu dan perkiraan terhadap efek perilakunya. Pemetaan kognitif dirancang untuk menangkap struktur pernyataan kausal seseorang dalam kaitannya dengan domain kebijakan tertentu dan menggambarkan konsekuensi dari struktur tersebut. Maka dari

itu, pada sub-bab berikutnya akan berisikan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pembuatan kebijakan serta pidato resmi dari pemerintah Hungaria—Perdana Menteri Viktor Orbán dan perwakilan yang bersangkutan—hingga elit politik yang bersangkutan. Setelah itu, peneliti akan melakukan pemetaan kognitif sebab dan akibat dari pernyataan yang terkandung dalam pidato serta dokumen terhadap kebijakan yang dibuat oleh Hungaria.

3.1.1 Politisasi Pengalaman Historis: *Trianon Syndrome* Sebagai *Strategic Culture* Hungaria

Dalam menilik apakah *trianon syndrome* menjadi aspek utama yang memengaruhi kebijakan luar negeri, maka perlu untuk memahami kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Hungaria, terutama selama invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022. Bukti *tangible* pertama adalah adanya Act No. 45 of 2010 on The Testimony For National Cohesion sebagai dokumen resmi pemerintah yang mencerminkan kehadiran *trianon syndrome*. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa manifestasi kehadiran trauma nasional mengenai perjanjian Trianon adalah melalui pemulihan terhadap persatuan nasional. Hal ini dilakukan dengan dua cara, antara lain 1) menggambarkan etnis Hungaria yang menjadi warga negara tetangga sebagai ‘korban’ yang menderita agar menggantikan rasa kehilangan dan kesedihan, dan 2) melakukan reunifikasi nasional atau penyatuan kembali etnis Hungaria sebagai cara Hungaria mengatasi perpecahan pra-Trianon (Feischmidt, 2020). Act No.

45 of 2010 on The Testimony For National Cohesion terdiri dari pembukaan dan lima bagian. Pembukaan undang-undang tersebut menyatakan bahwa:

*“...,recalling one of the greatest tragedies of Hungarian history, the Peace Treaty signed on the 4th of June, 1920 which dismembered historical Hungary and **placed the Hungarian nation under the jurisdiction of several states, taking into account the fact that the political, economic, legal and psychological problems caused by the enforced Peace Treaty have remained unresolved to this day,** respecting both the national interests of the Hungarian nation, as well as the right of other nations to hold different opinions about issues important to Hungarians, and aiming to contribute with this Act to the peaceful future–based on mutual understanding and cooperation–of peoples and nations living in the Carpathian Basin and also to reunite Europe dismembered by the tragedies of the 20th century,...”*

Pembukaan dalam dokumen tersebut menegaskan bahwa berbagai permasalahan, baik politik, hukum, ekonomi, hingga psikologis yang disebabkan oleh pemaksaan terhadap penandatanganan Perjanjian Trianon masih belum terselesaikan hingga hari ini, Sementara itu, tertulis bahwa undang-undang tersebut bertujuan untuk kedamaian masa depan masyarakat dan bangsa-bangsa yang tinggal di Cekungan Carpathia dan untuk menyatukan kembali Eropa yang terpotong-potong oleh tragedi abad ke-20. Selanjutnya, bagian yang sangat mencerminkan *trianon syndrome* tertera pada bagian ketiga undang-undang dengan pernyataan bahwa:

*“The Hungarian National Assembly declares that all members and communities of the Hungarian nation, subjected to the jurisdiction of other states, **belong to the single Hungarian nation** whose crossborder cohesion is a reality and, at the same time, a defining element of the personal and collective identity of Hungarians.”*

Penggunaan kalimat ‘*single Hungarian nation*’ pada bagian ketiga menegaskan keberadaan satu bangsa Hungaria. Hal ini kemudian dilanjutkan pada bagian keempat dengan Hungaria mewajibkan bahwa negaranya perlu memanggil seluruh etnis Hungaria, baik saat ini maupun generasi mendatang, untuk berjuang demi kohesi nasional. Salah satu caranya adalah dengan selalu mengingat tragedi nasional yang disebabkan oleh Perjanjian Trianon. Pada bagian ini, Hungaria secara resmi mendeklarasikan tanggal 4 Juni, hari dimana perjanjian Trianon ditandatangani, sebagai hari kohesi nasional (The Hungarian National Assembly, 2010).

“The Hungarian National Assembly feels obliged to call upon present members of the Hungarian nation and those of future generations to strive for national cohesion, by forever bearing in mind the national tragedy brought about by the enforced Peace Treaty of Trianon, by taking into account our own mistakes that rightly aggrieved members of other nations, and learning from those mistakes, by drawing strength from examples of national cohesion and achievements of national revival in the struggles of the past ninety years. Thereof the National Assembly declares the 4th of June, the day of the enforced Peace Treaty of Trianon of 1920, the Day of National Cohesion.”

Terhitung sejak dimulainya invasi Rusia ke Ukraina, 24 Februari 2022, Viktor Orbán memberikan pidato-pidato yang merujuk pada keinginan untuk mengembalikan ‘Greater Hungary’ atau kondisi kejayaan Hungaria sebelum adanya peristiwa Perjanjian Trianon. Mengutip dari data pidato dan wawancara dalam laman resmi pemerintah Hungaria, About Hungary, dari tahun 2022 hingga 2024—atau kurun waktu dua tahun—Hungaria secara tersurat menyampaikan upayanya untuk

melakukan penyatuan nasional etnis-etnis Hungaria yang tinggal di luar teritorial Hungaria.

Pada 24 Februari 2022, Hungaria yang diwakili oleh Viktor Orbán secara resmi menyatakan pandangannya terhadap invasi Rusia ke Ukraina dengan melakukan pembentukan National Security Operational Group bersama dengan Uni Eropa dan NATO serta mengutuk intervensi militer yang dilakukan oleh Rusia, sebagai berikut “...*We therefore convened the National Security Operational Group. Together with our allies from the European Union and NATO, we condemn Russia’s military intervention*” atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai “...Oleh karena itu, kami membentuk Kelompok Operasional Keamanan Nasional. Bersama dengan sekutu kami dari Uni Eropa dan NATO, kami mengutuk intervensi militer Rusia” (Orbán, 2022s). Meskipun demikian, Hungaria menegaskan bahwa keamanan rakyat Hungaria merupakan prioritas nomor satu.

“Hungary must not be drawn into this military conflict because for us the number one priority is the security of the Hungarian people. Therefore, either deploying military personnel or sending military equipment to Ukraine is out of the question. We shall naturally provide humanitarian assistance, however.”

Pernyataan tersebut kemudian mengimplikasikan adanya sikap netral yang dilakukan oleh Hungaria dalam invasi Rusia ke Ukraina dengan tidak berpihak ke salah satu negara. Pada April 2022, Hungaria memutuskan untuk menjauhi perang. Dalam pidato Viktor Orbán di Budapest pada 18 Februari 2023 mengenai *State of The Nation*, Hungaria menyatakan bahwa mereka memiliki hak untuk mendefinisikan

kepentingan nasionalnya sendiri. Pemberian bantuan kemanusiaan ke Ukraina tidak berarti memutuskan hubungan Hungaria dengan Rusia, *“for us, humanitarian support for Ukraine does not mean severing our ties with Russia, because that would run counter to our national interests, which we have the right to define for ourselves”* (Orbán, 2023c).

Hungaria yang semula telah mengklaim negaranya sebagai negara anti-imigran dengan menutup segala akses perbatasan serta mengeluarkan kebijakan Stop Soros Law, kemudian membuka kembali perbatasan-perbatasan tersebut ketika terjadi invasi Rusia terhadap Ukraina (Origo, 2022). Alasan Viktor Orbán di balik penerimaan pengungsi Ukraina didasarkan pada anggapan bahwa Hungaria dan Ukraina merupakan keluarga, *“Hungary is a good friend of Ukraine and the Ukrainian people. If they need any help, we are here and they can count on us”* (Egan, 2022). Namun, kedekatan Ukraina sebagai *‘good friend’* Hungaria tidak dapat mendikte bagaimana tindakan Hungaria dengan Rusia. Ukraina melihat bahwa Hungaria seolah terlibat dalam kejahatan perang yang dilakukan Rusia. Meskipun Hungaria telah memberikan bantuan kemanusiaan terbesar ke Ukraina sepanjang sejarahnya dan semula turut mengutuk tindakan Rusia, tetapi Hungaria mengubah kebijakan luar negerinya dalam memandang invasi tersebut dengan tetap menjalin hubungan kerja sama dengan Rusia, terutama dalam bidang ekonomi, serta cenderung tidak memihak Ukraina hingga mengindikasikan tindakan sentimen anti-Ukraina di Uni Eropa dan NATO.

Seperti apa kepentingan nasional Hungaria yang telah mereka definisikan sendiri? Hampir seluruh pernyataan yang diberikan oleh Viktor Orbán menyatakan dukungan Hungaria terhadap Ukraina, namun pernyataan tersebut turut serta diikuti dengan penegasan terhadap kepentingan nasional Hungaria dan etnis Hungaria. Viktor Orbán seringkali menyatakan bahwa Hungaria melihat konflik antara Rusia dan Ukraina melalui sudut pandang Hungaria—bukan negara lain, terhitung disampaikan pada 4 Maret 2022 dan 5 Maret 2022 dalam wawancara yang berbeda.

*“This isn’t the time for that. This is the time to stand up for Hungary’s interests. This isn’t the time to look at this conflict through American eyes, or through French or German eyes, but through Hungarian eyes. **And from a Hungarian perspective, the most important thing in this conflict is the peace and security of the Hungarian people**”*

Dalam sudut pandangan Hungaria terhadap invasi Rusia ke Ukraina, Hungaria memandang bahwa hal yang paling utama dan terpenting adalah perdamaian dan keamanan rakyat Hungaria (Orbán, 2022p). Hal serupa turut disampaikan pada kesempatan lain, Viktor Orbán menyatakan bahwa Hungaria menggunakan satu prisma dalam melihat sudut pandang, yaitu prisma Hungaria, sebelum mengambil keputusan. Prisma Hungaria memandang bahwa yang menjadi kepentingan Hungaria dalam konflik Rusia–Ukraina adalah apa yang menjadi kepentingan orang Hungaria di Cekungan Carpathian (Orbán, 2022o).

*“But before we make our decisions, there is only one possible viewpoint for us, and **we can only view matters through one prism: the Hungarian prism**. In this situation, what is in our*

interest? In this situation, what is in the interest of the Hungarians in the Carpathian Basin?”

Pernyataan Viktor Orbán pada 18 November 2022 turut menegaskan bahwa Hungaria harus menemukan jalur kebijakan luar negerinya sendiri tanpa didikte pengaruh eksternal—pihak barat—di tengah situasi konflik Rusia dan Ukraina, *“in this situation Hungary must find its own foreign policy path. What we need to reckon with is the resurgence of a trend which, according to historical experience, has always brought only bad things for Hungary”* (Orbán, 2022c).

Pada wawancara yang sama, Viktor Orbán turut menyampaikan sikap Hungaria dimana negaranya mengutuk Rusia dan membantu masyarakat Ukraina, tetapi tidak mau menempatkan kepentingan Ukraina di atas kepentingan Hungaria, *“so we condemn Russian aggression and we’re helping the Ukrainian people, but we aren’t willing to put Ukraine’s interests before our own”* (Orbán, 2022c). Dengan Viktor Orbán merujuk pada ingatan akan pengalaman historis membuktikan bahwa pengalaman historis menjadi faktor utama dalam mendefinisikan kebijakan luar negeri Hungaria.

Kepentingan nasional Hungaria menjadi alasan dibalik perubahan kebijakan luar negeri Hungaria terhadap Ukraina dalam invasi Rusia ke Ukraina. Tindakan yang berbanding terbalik dengan pernyataan Hungaria pada saat awal mula terjadi invasi dengan mengutuk Rusia, berakhir dengan kerja sama yang terjalin dengan kuat di antara kedua negara. Dalam hal ini, Ukraina yang diwakilkan oleh Oleg Ustenko—penasihat

ekonomi Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy—memandang bahwa Hungaria terlibat dalam kejahatan perang yang dilakukan oleh Rusia. Pernyataan yang dikeluarkan oleh Oleg Ustenko, *“If you’ve seen the video where Russians cut the head off a Ukrainian soldier—the Hungarians are paying for the knife,”* berdasarkan pada tindakan Hungaria yang menandatangani kesepakatan impor gas dari Rusia.

Asumsi mengenai keterlibatan dalam perang kemudian dibantah oleh Peter Szijjarto—Menteri Luar Negeri Hungaria—pada konferensi pers setelah perjanjian tersebut ditandatangani dengan menyatakan bahwa kerja sama energi antara Hungaria dan Rusia tidak ada hubungannya dengan preferensi politik Hungaria (Ridgwell, 2024). Tak hanya menjalin peningkatan kerja sama dengan Rusia, Hungaria seringkali tidak mendukung Ukraina dalam berbagai kebijakan Uni Eropa dalam mengatasi konflik tersebut. Hungaria menghalangi upaya Uni Eropa untuk memberikan bantuan militer dan keuangan kepada Ukraina serta menolak memberikan senjata ke Ukraina, bahkan Hungaria tidak mengizinkan pengiriman senjata melintasi perbatasannya (Spike, 2024). Selain itu, Hungaria sejak tahun 2017 hingga saat ini konsisten menjadi negara yang telah memblokir pertemuan antara Dewan Ukraina dan NATO (Hopkins, 2020).

Alasan perubahan kebijakan luar negeri Hungaria kepada Ukraina terlihat dari kepentingan nasional Hungaria yang menjadi dasar dari segala tindakan Hungaria di dunia internasional. Pidato dan sambutan yang

diberikan perdana menteri Viktor Orbán sejak Februari 2022 hingga Februari 2024 seringkali diucapkan bersamaan dengan kata-kata seperti *national unification* (unifikasi nasional), *Hungarian people* (masyarakat Hungaria), *Hungarian minorities* (minoritas Hungaria), *Hungary's national interests* (kepentingan nasional Hungaria), *Hungary's security* (keamanan Hungaria), dan *Hungary's sovereignty* (kedaulatan Hungaria). Hal ini mengindikasikan adanya keterikatan antara *national trauma* dan kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh Hungaria. *National trauma* yang dihadapi tercermin dari adanya rujukan pidato, wawancara, maupun pernyataan yang dikeluarkan oleh para pembuat keputusan—perdana menteri maupun individu dalam partai politik—dengan merujuk pada sejarah Hungaria.

Apabila merujuk pada historis Hungaria, maka perasaan trauma akibat Perjanjian Trianon Tahun 1920 menjadi faktor utama yang mendasari serangkaian kebijakan Hungaria di bawah pemerintahan Viktor Orbán. Dalam berbagai pidato dan wawancara, Viktor Orbán seringkali membawa pengalaman historis tersebut dalam menjustifikasi tindakannya terhadap Ukraina. Pada dasarnya, hubungan kedua negara dapat dikategorikan fluktuatif akibat adanya perbedaan dalam memandang minoritas Hungaria di Ukraina. Sejak Pemerintahan Viktor Orbán berjalan, Hungaria membuat kebijakan yang mengatur tentang etnis Hungaria di negara-negara tetangga, termasuk Ukraina, yang mengindikasikan keinginan untuk melakukan unifikasi nasional. Unifikasi nasional

disampaikan secara terbuka melalui pidato Viktor Orbán setelah mengucapkan sumpah jabatan perdana menteri (Orbán, 2022l).

“And across the Carpathian Basin I see the spiritual and physical imprints of a reviving sense of national belonging. This is not only good for Hungarians living beyond the borders, but it also strengthens universal Hungarian identity and the motherland. Hungarians beyond the borders can count on us, and we will be untiring in continuing our work of national unification.”

Perdana Menteri Viktor Orbán berupaya menegaskan bahwa terdapat kuatnya kebangkitan terhadap rasa identitas nasional di antara warga Hungaria, termasuk mereka yang di luar perbatasan Hungaria, dimana mengarah pada komitmen untuk melanjutkan upaya menyatukan rakyat Hungaria. Dengan cara Viktor Orbán menawarkan perlindungan dan kewarganegaraan kepada etnis Hungaria di seluruh wilayah, termasuk Ukraina, serta memperlakukan Hungaria sebagai suatu negara yang ‘meluas’ di luar teritorial negaranya sejauh dimanapun orang Hungaria tinggal, menandakan bahwa terdapat manifestasi ‘Greater Hungary’ yang didukung dari adanya *national trauma* (Champion, 2024).

*“...but we have 200,000 Hungarians living in Ukraine, some of whom have dual citizenship. And I wondered how many Hungarians would die if they were drafted into the army, or if the Russians were to shoot their way into Transcarpathia. And so far we’ve lost about two hundred people: two hundred Hungarians have died. **So when we talk about the war, we Hungarians have already lost two hundred people who died as conscripts at the front**—most of them dual citizens. So we’re within this war’s immediate impact zone.”*

Pada peristiwa invasi Rusia ke Ukraina, Viktor Orbán berfokus pada keselamatan dan keamanan etnis minoritas Hungaria yang tinggal di

kawasan Ukraina (Orbán, 2022e). Hungaria, melalui diskusi Viktor Orbán dengan direktur majalah Cicero, menyatakan bahwa mereka terdampak dalam perang antara Rusia dan Ukraina akibat tewasnya etnis Hungaria di kawasan Ukraina. Merujuk pada pernyataan Orbán tersebut, terdapat sebuah komunitas etnis Hungaria yang besar di Transcarpathia dengan jumlah sebanyak 200.000 minoritas yang dikhawatirkan oleh Hungaria. Konflik Rusia dan Ukraina telah menyebabkan Hungaria kehilangan sekitar dua ratus orang Hungaria yang secara resmi dinyatakan meninggal hingga Oktober 2022. Gergely Gulyás selaku Kepala Kantor Perdana Menteri Hungaria pada 16 Februari 2023 di Sátoraljaújhely. Gulyás menyatakan bahwa Hungaria berkepentingan agar rakyat Hungaria di Transcarpathia hanya menderita sesedikit mungkin. Hal ini kemudian menjadi motivasi Hungaria untuk menolak pengiriman senjata karena dikhawatirkan akan membahayakan warga Transcarpathia (About Hungary, 2023)

Menanggapi tindakan Hungaria, Ukraina merasa kedaulatannya terancam karena bagaimanapun negaranya tetap berdaulat atas setiap masyarakat yang berada di teritorial. Hungaria seringkali mengungkit teritorial Ukraina yang ditempati oleh mayoritas etnis Hungaria merupakan ‘bekas’ wilayah Hungaria sebelum Perjanjian Trianon tahun 1920. Adanya kepentingan nasional yang didasarkan oleh *national trauma* semakin didukung dengan pernyataan Viktor Orbán dalam wawancara bersama Tucker Carlson pada 30 Agustus 2023 mengenai pandangannya terhadap

kondisi Ukraina saat ini. Dalam wawancara tersebut, Viktor Orbán menyebutkan bahwa Ukraina merupakan bagian dari Hungaria secara historis. Banyaknya warga Hungaria yang tewas karena invasi Rusia ke Ukraina, sekitar 150.000 orang, menjadi permasalahan utama Viktor Orbán. Secara konsisten, Viktor Orbán selalu mengacu pada Hungaria sebagai sebuah bangsa, bukan negara, dengan mendefinisikan Hungaria sebagai *historical nation*. Adanya definisi sebagai suatu bangsa membuat Viktor Orbán menekankan karakter antropologis dan menjunjung tinggi sejarah mereka. Bangsa Hungaria diartikan dalam konteks ‘Greater Hungary’ yang berarti masa kejayaan Hungaria sebelum adanya Perjanjian Trianon 1920.

Berikut adalah bukti bahwa pengalaman historis merupakan *strategic culture* Hungaria dan menjadi dasar bagi tindakan Hungaria dalam menanggapi invasi Rusia ke Ukraina. Bukti ini berdasarkan pernyataan resmi pemerintah Hungaria yang diwakilkan oleh Perdana Menteri Viktor Orbán dengan merujuk pada *national trauma* yang dialami oleh Hungaria.

Budaya Strategis Hungaria dan Interpretasinya	Tokoh Kunci Pengambil Kebijakan	Pernyataan Resmi Pemerintah
Perasaan trauma akibat Perjanjian Trianon tahun 1920 atau <i>trianon syndrome</i> dengan dibuktikan adanya 'ketakutan' mengalami pengalaman serupa.	Viktor Orbán (2022)	<i>"Our situation has improved, but there has not been a turnaround. This is the alpha and omega of everything: if there is no turnaround, sooner or later we will be displaced from Hungary, and we will be displaced from the Carpathian Basin."</i>
Perasaan trauma akibat Perjanjian Trianon tahun 1920 atau <i>trianon syndrome</i> dengan dibuktikan adanya sikap Hungaria yang belajar dari pengalaman historis.	Viktor Orbán (2022)	<i>"In Hungary, history has taught us that a country without borders is like an egg without a shell. This is why, after the crisis erupted, we Hungarians decided that – no matter what anyone said – we would not compromise our security: we defended our borders and we built a fence."</i>
Perasaan trauma akibat Perjanjian Trianon tahun 1920 atau <i>trianon syndrome</i> dengan dibuktikan melalui adanya kebijakan yang bersifat kontinuitas dari sejarah.	Viktor Orbán (2022)	<i>"So if you look back over Hungarian history, you'll see that from the foundation of the state, Hungarians have always believed in what's expressed in modern terms as "connectivity". So Hungary's always been involved in some kind of cooperation while maintaining relations with the rest of the world. You'll see this if you look at its foreign policy, from the first kings of the Árpád Dynasty right up to the Austro-Hungarian Monarchy; and you see the continuity of this in our policy too."</i>

Tabel 3.1 *Strategic Culture Hungaria*

Sumber: Olahan Peneliti berdasarkan Orbán (2022a; 2022i; 2022k)

Pada Tabel 3.1 mengenai *Strategic Culture* Hungaria, pernyataan Viktor Orbán membuktikan bahwa Hungaria menggunakan pengalaman sejarah dalam memandang suatu fenomena. Zsolt Semjén selaku wakil perdana menteri Hungaria menyatakan pada malam peringatan 100 tahun Perjanjian Trianon di tahun 2020 bahwa Hungaria ‘mengatasi’ trauma terhadap perjanjian tersebut melalui pembangunan tanah air dan penguatan bangsa. Upaya tersebut dilakukan dengan menciptakan identitas nasional yang kuat. Dalam hal ini, Hungaria menganggap bahwa mengklaim kembali kawasan-kawasan ‘bekas’ wilayah Hungaria sebelum Perjanjian Trianon adalah sesuatu yang sangat tidak realistis. Meskipun demikian, Hungaria menganggap penerimaan terhadap Perjanjian Trianon, yang berdampak pada perubahan proporsi etnis, sebagai sebuah pengkhianatan (About Hungary, 2020).

Pernyataan Viktor Orbán dalam wawancara dengan HírTV pada 3 April 2022 menyatakan bahwa Hungaria akan berantakan dan tercerai berai apabila tidak memiliki rasa kesatuan dan kebersamaan sebagai suatu etnis Hungaria. Viktor Orbán menegaskan bahwa hal tersebut akan menyebabkan negara Hungaria direbut oleh pihak lain apabila berkaca dari sejarah yang mereka pernah alami, *“We’ll fall apart if we don’t possess the deep sense of spiritual community that binds Hungarians together, if we don’t unite with one another. This is because we’re foreigners surrounded by peoples of a different kind. And if we fall apart, our country will be*

taken from us. We have bitter historical experience of this” (Orbán, 2022m).

Pernyataan resmi lainnya yang mendukung trauma terhadap pengalaman historis dapat dilihat dari pernyataan Viktor Orbán dalam pidatonya 16 Mei 2022, *“I am convinced that Hungarians—not only the leaders, but also the broadest sections of the population—have a highly developed historical instinct, and a particularly highly developed sense of danger. This is no wonder. A thousand years is a long time, and **the Hungarians have learned that—in times of danger—disunity, confrontation and internal conflict can lead to serious consequences: to decline, to fall, and even to the loss of one’s country**”* (Orbán, 2022l).

Pernyataan ini memiliki interpretasi yang mengartikan bahwa orang Hungaria memiliki naluri sejarah yang sangat berkembang dan tingginya rasa bahaya atau takut terhadap ancaman. Hal ini dipengaruhi oleh pengalaman sejarah yang telah mereka lalui sehingga menyebabkan adanya pemikiran bahwa ancaman dan bahaya dapat menyebabkan konsekuensi yang serius, termasuk hilangnya negara. Maka dari itu, pengalaman historis Hungaria ini berdampak kolektif menjadi perasaan trauma yang kemudian menjadi dasar dalam mendefinisikan kepentingan nasionalnya.

Meskipun Hungaria dan Ukraina merupakan negara tetangga, hubungan keduanya telah bermasalah akibat isu etnis minoritas Hungaria di kawasan Ukraina. Hungaria bersikap kepada Ukraina berdasarkan dengan bagaimana Ukraina memperlakukan etnis Hungaria di wilayahnya.

Hal ini disampaikan oleh Viktor Orbán dalam beberapa pernyataan mengenai invasi Rusia ke Ukraina. Belum genap satu bulan sejak invasi terjadi, Viktor Orbán menyatakan bahwa Hungaria tidak membawa permasalahan mengenai etnis dalam membantu Ukraina, *“The Ukrainians are fighting for their lives, and **we’re not bringing up the grievances we have or haven’t suffered in the past, because that’s not possible now.** We’re a consequential and intelligent country: we know when to talk, what to talk about, with what emphasis and how to talk. Now isn’t the time.”* Namun kemudian mengungkit kembali di akhir pernyataannya, *“...but **we still know that Hungarians in Transcarpathia have always had problems** and we also know that there are Ukrainian groups that have always been suspicious of Hungarians.”* (Orbán, 2022p).

Dalam beberapa kesempatan, Viktor Orbán seringkali memberikan pernyataan hingga pidato yang menyatakan kepentingan nasional Hungaria dalam konflik Rusia dan Ukraina yang menjadi dasar tindakan Hungaria terhadap Ukraina. Hungaria selalu membawa permasalahan etnis minoritas Hungaria yang tidak diperlakukan dengan baik oleh Ukraina, *“We will help Ukrainian refugees. **We are now putting aside the fact that in the past Hungarians in Transcarpathia have suffered violations of their rights ...** Despite all this, Ukrainians can count on Hungary and the Hungarian government”* (Orbán, 2022l). Pernyataan ini menggambarkan bahwa Ukraina dapat bergantung pada Hungaria dalam menangani konflik yang terjadi. Namun, pernyataan tersebut kemudian dipatahkan dengan

pernyataan Viktor Orbán pada bulan-bulan berikutnya dimana menyatakan bahwa Hungaria tidak akan membantu Ukraina karena masalah etnis minoritas. Pada 11 Oktober 2022, Viktor Orbán memberikan pernyataan *“So I’m not willing to help the Ukrainians, while at the same time destroying Hungary. **I’m not willing to help the Ukrainians while at the same time Hungarians are dying**”* yang berarti Hungaria tidak akan membantu Ukraina di saat tindakan membantu tersebut menghancurkan Hungaria dan apabila rakyat Hungaria di Ukraina mengalami keadaan sekarat akibat tindakan pemerintah Ukraina (Orbán, 2022e). Hal ini kemudian semakin ditegaskan dalam wawancaranya bersama majalah Budapester Zeitung pada 26 Oktober 2022 bahwa Ukraina tidak dapat mengandalkan dukungan penuh Hungaria sampai minoritas Hungaria di Ukraina kembali mendapatkan hak-haknya, terutama mengenai penggunaan bahasa Hungaria, *“we made it clear then that **Ukraine cannot count on Hungary’s full support until the Hungarian minority in Ukraine regains its original rights. The key phrase is this: language law**”* (Orbán, 2022d).

Pemerintah Hungaria menuduh Ukraina menganiaya hak-hak minoritas Hungaria di teritorial negaranya bagian Barat (Spike, 2024). Alasan ini menjadi faktor Hungaria tidak akan mendukung Ukraina dalam masalah apapun di dunia internasional, termasuk dalam Perang Rusia–Ukraina, hingga Ukraina memulihkan hak berbahasa etnis Hungaria di Ukraina. Perselisihan antara Hungaria dan Ukraina memuncak setelah

Ukraina mengesahkan undang-undang pada tahun 2017 mengenai penggunaan bahasa minoritas di sekolah. Undang-undang ini dianggap sebagai pembatasan penggunaan bahasa ibu etnis Hungaria di Ukraina. Sebagai tanggapan dari kebijakan Ukraina tersebut, Hungaria tidak mendukung upaya Uni Eropa untuk melakukan perluasan anggota yang akan mencakup Ukraina (Gyori & Than, 2023). Hal ini membuktikan bahwa setelah lebih dari 100 tahun, perasaan sakit hati atau luka terhadap Perjanjian Trianon membekas dan berhasil dipolitisasi oleh pemerintah. Perjanjian Trianon dianggap kejam, tidak adil, dan menjadi sumber permasalahan atas hak-hak etnis Hungaria negara tetangga, termasuk Ukraina, hingga saat ini (Inotai, 2019). Perasaan tersebut meluas di kalangan masyarakat Hungaria dan berusaha dipertahankan oleh Pemerintahan Viktor Orbán dengan dijadikan sebagai *strategic culture* sehingga turut memengaruhi bagaimana hubungan Hungaria dengan negara-negara tetangganya (Hopkins, 2020).

Menurut Shaun Walker dalam artikel The Guardian (2020), Perjanjian Trianon menjadi bagian utama dari identitas nasional Hungaria. Perasaan trauma terhadap perjanjian tersebut digunakan selama pemerintahan Viktor Orbán dalam membentuk serangkaian kebijakannya. Meskipun sudah berlalu lebih dari 100 tahun, para anak muda di Hungaria diharapkan untuk terus mengukir pengalaman historis Hungaria dalam hati dan pikiran mereka dengan tujuan belajar dari masa lalu. Hal ini disampaikan oleh László Kövér selaku ketua parlemen pada sesi parlemen

dalam memperingati 100 tahun penandatanganan Perjanjian Trianon. Dalam artikel lain, The Guardian (2020) menjelaskan bahwa kehadiran *trianon syndrome* sebagai dasar dari kepentingan nasional Hungaria menunjukkan adanya upaya Hungaria sebagai sebuah negara yang sedang bangkit dari kekalahan. Apabila merujuk pada pandangan tersebut, maka peneliti meyakini bahwa *trianon syndrome* menjadi pemicu atau motivasi kebijakan Hungaria yang bertujuan untuk mencapai kembali ‘Greater Hungary’.

Meskipun pemerintah Viktor Orbán tidak pernah berbicara secara langsung mengenai keinginan untuk merebut kembali kawasan Hungaria yang hilang, tetapi upaya tersirat serupa dilakukan Hungaria dengan menjadikan populasi etnis Hungaria di negara-negara tetangga sebagai landasan kebijakan luar negerinya. Dengan fokus tersebut, Hungaria memperkuat kontrolnya atas politik Hungaria di negara-negara tetangga yang memiliki cukup banyak populasi minoritas Hungaria, termasuk Ukraina (Walker, 2020). Berdasarkan pengamat Gabor Egry yang dikutip dari Financial Times (2020), Viktor Orbán memanfaatkan perjanjian Trianon sebagai upaya untuk memperkuat tindakannya melalui kebijakan luar negeri yang tidak konsisten terhadap Uni Eropa dalam berbagai isu—termasuk dalam hal ini peneliti turut mengasumsikan terhadap konflik Rusia dan Ukraina—dan memajukan pandangan nasionalisnya.

Hungaria mengakui bahwa tindakan membantu Ukraina bukan merupakan kepentingan nasionalnya, melainkan hanya sebagai tindakan

yang seharusnya dilakukan—sesuai dengan adab membantu orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Viktor Orbán menegaskan bahwa Hungaria memiliki batas dalam membantu Ukraina, yaitu selama tidak mencederai kepentingan nasional Hungaria.

*“We aren’t helping because doing so benefits Hungary, but because they’re in distress; and a people in distress must be given help to an extent which doesn’t actually harm Hungarian interests. This is why we’re helping, and not because doing so is in our interest. Let’s make that very clear. **Helping Ukraine isn’t in Hungary’s national interest**; it’s quite simply a civilised way of behaving, which we can of course extend to them provided doing so doesn’t harm Hungarian interests.”*

Merujuk pada pernyataan bahwa membantu Ukraina bukan merupakan kepentingan nasional Hungaria, Viktor Orbán memberikan pernyataan melalui unggahan Facebook pada 9 Februari 2023 bahwa rakyat Hungaria akan terus membantu rakyat Ukraina selama perang berlangsung melalui pemberian bantuan kemanusiaan dimana secara bersamaan Hungaria tetap tegas untuk terus melanjutkan kebijakan tidak memasok senjata ke Ukraina, *“As it drags on, we Hungarians will continue to help the Ukrainians with humanitarian aid, but we will also continue our policy of not supplying weapons.”* (Orbán, 2023d).

Laporan dari GIS Report (2023) mengungkapkan sikap pemerintahan Fidesz di tengah konflik Rusia dan Ukraina. Menurut Fidesz, Hungaria memposisikan diri di tengah politik internasional dengan melihat tugas terpentingnya, yaitu untuk mewakili kepentingan Hungaria dan menjaga kedaulatan negara. Kedua hal tersebut merupakan implikasi dari

trianon syndrome. Dalam peristiwa perang Rusia–Ukraina, Hungaria akan melakukan berbagai cara agar tidak terlibat di dalam konflik karena perang bukan merupakan kepentingan Hungaria. Hungaria melihat bahwa Ukraina merupakan negara tetangga dan banyaknya etnis minoritas Hungaria di Kawasan Transcarpathia mendorong Hungaria untuk melihat perang dengan sudut pandang spesial—perspektif Hungaria—yang berbeda dengan pandangan *mainstream* Uni Eropa (Bloomberg Live, 2023).

Hal serupa turut disampaikan oleh Viktor Orbán yang menegaskan kembali pertanyaan terkait posisi Hungaria di konflik Rusia dan Ukraina. Pada 21 Desember 2022, tepatnya dalam konferensi pers internasional di Budapest, Viktor Orbán menyatakan bahwa Hungaria berada di pihak Hungaria. Dengan demikian, Hungaria tidak ingin tindakannya didikte atau dipaksa oleh pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan nasional negara itu sendiri, bahkan Viktor Orbán secara langsung mengaku tidak siap untuk membantu Ukraina dengan cara yang merusak Hungaria—tidak sejalan dengan kepentingan nasional negara (Koenen, 2023).

Pada 2 Maret 2023, unggahan Twitter Viktor Orbán (@PM_ViktorOrban) menegaskan bahwa Hungaria akan bersikap sesuai slogan ‘Hungary First!’ sebagai kompas moral negara tersebut. Dalam cuitannya, Viktor Orbán menyatakan bahwa Hungaria menghormati dan membantu Ukraina, tetapi Hungaria tidak dapat mendahulukan kepentingan Ukraina di atas kepentingan Hungaria, “...sebagai Perdana Menteri Hungaria, saya (Viktor Orbán) bertanggung jawab atas bangsa

Hungaria. Oleh karena itu, kami (Pemerintah Hungaria) akan selalu mengutamakan Hungaria!” (Orbán Viktor, 2023f).



Gambar 3. 2 Unggahan Twitter @PM_ViktorOrban

Sumber: Twitter.com

Kepentingan nasional Hungaria mengindikasikan adanya tujuan yang kompleks dengan dasar bahwa terdapat aspek yang lebih penting dari “ego” dalam suatu negara, yaitu keluarga, bangsa, dan Tuhan. Viktor Orbán menyatakan hal tersebut dalam wawancara bersama Tucker Carlson pada 30 Agustus 2023, *“It’s deeper (than the ideologies), it has an anthropological character, so on one side in Europe ... the groups of*

*people who think that the most important thing in the world is ego, themselves, me. The other people say it's not true because **there are certain things which are more important than me, than my ego .. family, nation, and God** and because they are more important than me, I have to serve this higher level of things"* Ketiga hal tersebut, keluarga, bangsa, dan Tuhan, menjadi dasar dari nilai politik yang dimiliki oleh Hungaria (TheDC Shorts, 2023). Maka dari itu, Hungaria memiliki keinginan akan unifikasi bangsa.

"National unification will continue, and Hungarians beyond our borders can continue to count on us, because we are of the same blood ... and the promise made to the provinces remains: we are launching unprecedented developments and providing more resources than the Hungarian provinces have ever seen – even under the Austro-Hungarian Empire"

Bukti ini semakin diperkuat dengan data outlet berita investigasi Atlatzso Erdelyi yang dikutip dari Financial Times (2020) bahwa pendanaan untuk komunitas etnis Hungaria di luar teritorialnya telah meningkat sejak kekuasaan Viktor Orbán. Pemerintah memiliki dana untuk membantu etnis minoritas Hungaria di enam negara melalui pendanaan pemerintah untuk Bethlen Gábor Fund. Pendanaan ini yang semula 2,9 miliar forint pada tahun 2010 meningkat menjadi 84 miliar forint pada tahun 2018. Hungaria mengklaim bahwa tujuan dari pendanaan tersebut adalah untuk membantu melestarikan warisan budaya dan rasa memiliki terhadap orang Hungaria sebagai suatu bangsa.

Viktor Orbán menegaskan kembali bahwa Hungaria memiliki kepentingan nasionalnya sendiri yang tidak dapat dilihat dari perspektif

Rusia maupun Ukraina dalam Antalya Diplomacy Forum pada Maret 2024. Adanya perdamaian yang ingin dicapai oleh Hungaria lebih mendasar kepada “*saved Hungarian lives*” atau selamatkan nyawa bangsa Hungaria. Secara tersurat, Orbán menegaskan bahwa wilayah tertentu dari Ukraina adalah milik Hungaria 100 tahun yang lalu melalui pernyataan “*...certain part of Ukraine, 100 years ago, belonged to Hungary.*” Bahkan, pada acara National Conservatism, Viktor Orbán menyatakan bahwa Ukraina saat ini bukanlah negara yang berdaulat karena keberlangsungan hidup Ukraina sebagai suatu negara di-*supply* oleh bantuan dari Uni Eropa dan Amerika Serikat. Perdana menteri Hungaria tersebut menegaskan bahwa secara realita, Ukraina tidak mungkin menang dalam perang Rusia–Ukraina (AP Archive, 2024).

Meskipun dapat disimpulkan bahwa *trianon syndrome* merupakan trauma kolektif yang dirasakan oleh Hungaria sebagai suatu bangsa, tetapi kenangan tentang Perjanjian Trianon dapat dikatakan sebagai trauma pribadi yang masih menghantui banyak warga Hungaria sebagai suatu hal yang tidak adil. Tak hanya dengan Ukraina, trauma ini turut memengaruhi negara-negara tetangga karena menjadi sumber pertikaian terkait hak-hak etnis Hungaria di negara ‘bekas’ Hungaria. Sementara itu, Viktor Orbán meromantisasi adanya trauma Trianon dengan mengatakan Peristiwa Trianon sebagai suatu amputasi atas wilayah yang telah diambil oleh pihak yang menang dalam Perang Dunia I, “apa yang sebelumnya tidak adil,

tetap tidak adil sampai akhir zaman. **Luka bisa disembuhkan, tetapi ‘amputasi’ tidak bisa**” (Latal et al., 2020).

Dengan demikian, Hungaria mendefinisikan kepentingan nasionalnya sebagai kepentingan nasional Hungaria yang berbeda dengan kepentingan nasional pada umumnya. Pemerintah Hungaria terlihat jelas memonopoli ‘*Hungarian*’ yang merujuk pada bangsa atau etnis Hungaria dengan kepentingan nasional. Para pembuat keputusan di Hungaria dalam proses mengambil keputusan dilakukan atas dasar kepentingan nasional Hungaria. Kepentingan nasional tersebut mengakar pada *national trauma* yang dialami oleh bangsa. Bukti dari argumen ini secara tersurat terdapat dalam wawancara Viktor Orbán di Kossuth Radio Programme “Good Morning Hungary” pada 3 Mei 2024 (Orbán, 2024a).

*“...we learned that **Hungary was twice forced into wars that tragically sealed the country’s future, its size, its territory, its population and its economic strength.** We didn’t want to take part in the First World War, and we didn’t want to take part in the Second World War; we were forced into both, and in the end we were among those who paid the highest price. It’s my personal conviction – and on this issue the Government’s united – that **we shall not allow Hungary to be forced for a third time into a war in which the Hungarians end up suffering the consequences, suffering the heaviest losses – or at least very heavy losses.** So we shall stand by our pro-peace position.”*

Wawancara tersebut menegaskan sikap inkonsistensi Hungaria terhadap invasi Rusia ke Ukraina yang terlihat dari perubahan kebijakannya terhadap Ukraina diakibatkan oleh pengalaman sejarah yang traumatis bagi bangsa Hungaria, sehingga menyebabkan Hungaria mengambil tindakan yang lebih defensif untuk menjaga kedaulatannya. Hal

ini terlihat dari pernyataan bahwa pemerintah Hungaria tidak mau terlibat dalam perang karena etnis Hungaria akan menderita kerugian yang paling berat–berkaca dari pengalaman historis. Pernyataan serupa turut terlihat pada 17 Mei 2024 pada program yang sama (Orbán, 2024b).

*“...perhaps even he didn’t know how big a problem it would be, **with two-thirds of the country lost, and one third of the Hungarian population ending up outside our borders, outside the lines of the new borders.** During that war we **suffered terrible losses – both in terms of lives, wealth, territory and population.** So it was a tragedy for Hungary ... of course situations today are never the same as situations in the past ..., but there’s no doubt that the great powers surrounding us today have an interest in pushing Hungary into this war, and we must resist them. Our predecessors failed to do so. I have set myself the goal that we will succeed.”*

Penegasan pada kehilangan dua pertiga wilayah dan satu pertiga populasi etnis yang berakhir di luar perbatasan Hungaria serta adanya kerugian yang dialami dalam bentuk nyawa, kekayaan, wilayah, dan populasi merujuk pada sikap *trianon syndrome* karena pernyataan tersebut secara tersurat menggambarkan bagaimana Perjanjian Trianon memberikan luka mendalam bagi Hungaria hingga saat ini. Selanjutnya, analisis ini semakin diperkuat dengan simbol-simbol yang mengarah pada Hungaria sebelum adanya perjanjian Trianon 1920 hingga perjanjian itu sendiri, seperti pembangunan monumen hingga penggunaan simbol-simbol tertentu yang dilakukan oleh Perdana Menteri Viktor Orbán dan Partai Fidesz.

3.1.2 Analisis Simbolik *Trianon Syndrome* Sebagai Pengaruh Tindakan Hungaria ke Ukraina

Selama pemerintahan Viktor Orbán, *trianon syndrome* semakin hadir ke permukaan masyarakat dan diromantisasi melalui penggunaan simbol-simbol tertentu. Penggunaan simbol ini merujuk pada simbol-simbol nasional yang berkaitan dengan perjanjian Trianon sehingga memberikan penekanan pada masa lalu sejarah suatu bangsa dengan cara yang dapat diromantisasi, diagungkan, dan dimitoskan. *Trianon syndrome* di Hungaria dapat dianalisis dengan memeriksa bagaimana hal itu memengaruhi strategi besar Hungaria dalam mempertahankan diri dan menanggapi ancaman dalam invasi Rusia ke Ukraina. *Trianon syndrome* merujuk pada trauma dan kebencian yang dirasakan oleh warga Hungaria atas Perjanjian Trianon. Peristiwa ini dipandang sebagai tragedi nasional dan simbol dari perasaan Hungaria yang menjadi korban dari kekuatan besar. Maka dari itu, simbol-simbol yang seringkali muncul pada bagian ini adalah peta ‘Greater Hungary’ atau wilayah Hungaria pre-Trianon serta simbol-simbol yang melambangkan perjanjian Trianon melalui monumen-monumen yang dibangun. Dalam hal ini, simbol berupa monumen, museum, hingga relief menjadi sebuah sejarah publik yang sangat penting dalam mempertahankan memori akan Peristiwa Trianon.

Perdana Menteri Viktor Orbán menggunakan syal yang bergambar peta ‘Greater Hungary’, wilayah Hungaria dengan perbatasan negara sebelum adanya perjanjian Trianon tahun 1920, pada pertandingan sepak

bola antara Hungaria dan Yunani tanggal 20 November 2022 di Budapest. Peta tersebut menggambarkan Hungaria yang mencakup wilayah Ukraina dan negara-negara tetangga lain. Penggunaan simbol peta ‘Greater Hungary’ pada syal tersebut mengundang kontroversi karena mengindikasikan adanya kemungkinan sikap *irredentism* atau restorasi wilayah. Hal ini mendorong Ukraina menuntut permintaan maaf terhadap Hungaria di tengah invasi Rusia–Ukraina. Oleg Nikolenko selaku juru bicara Menteri Luar Negeri Ukraina menyatakan bahwa tindakan Viktor Orbán merupakan promosi gagasan revisionisme sehingga tidak dapat diterima oleh Ukraina (BBC News, 2022).



Gambar 3. 3 Viktor Orbán memakai syal bermotif peta ‘Greater Hungary’
Sumber: BBC

Namun, Viktor Orbán melakukan klarifikasi pada 21 Desember 2022 dengan menjawab pertanyaan seorang jurnalis László Mészáros, “*I’m part of the historical position: Hungary was – it’s a historical country*

which was – like the symbol shows. Go to the Hungarian parliament; nobody ever protested why these symbols are there, because it's an old country. That belongs to history. So that expresses national unity, and so on and so on. So therefore historical symbols are a normal part of our life: it's nothing extraordinary, nothing special." Klarifikasi ini menegaskan bahwa syal yang digunakan bukan merupakan suatu yang luar biasa dan tidak berarti spesial, hanya mengekspresikan simbol historis bagi Hungaria. Hal ini tidak sejalan dengan pernyataan Viktor Orbán melalui Facebook yang menyatakan bahwa tim nasional Hungaria merupakan tim seluruh warga Hungaria dimana pun mereka tinggal (Orbán Viktor, 2022).



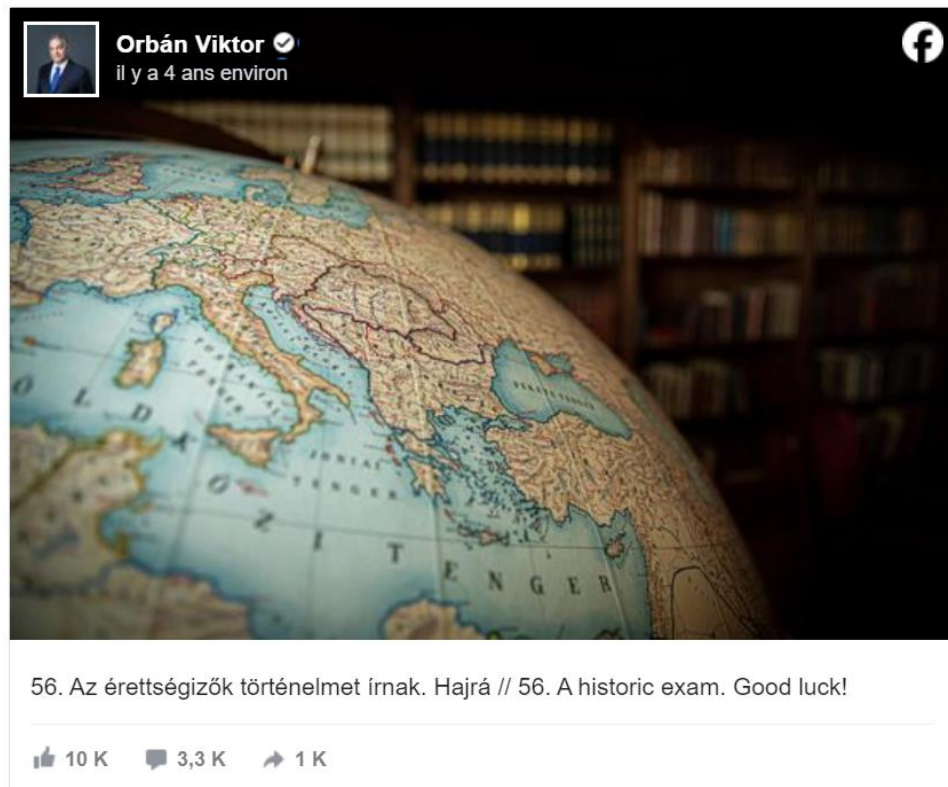
Gambar 3. 4 Unggahan Facebook Perdana Menteri Viktor Orbán
Sumber: Facebook.com

Unggahan Facebook Viktor Orbán diterjemahkan menjadi “Sepak bola bukanlah politik. Jangan kita melihat sesuatu yang tidak ada. Semua tim Hungaria dari tim nasional Hungaria, di mana pun mereka tinggal!” diikuti tiga emoji bendera Hungaria. Meskipun telah mengunggah klarifikasi terhadap tindakannya, tetapi tidak mengubah pandangan buruk Ukraina terhadap Hungaria terkait upaya revisionism, terlebih pemakaian syal tersebut digunakan ketika sedang terjadi invasi oleh Rusia. Salah satu perwakilan Rumania, Alin Mituta, turut memberikan komentar bahwa Hungaria bermimpi untuk mengubah perbatasan dan menganggap perilaku Hungaria sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab selama invasi Rusia ke Ukraina dan aneksasi wilayah Ukraina (Ferenc, 2022).

Sejak kembali berkuasa pada tahun 2010, Viktor Orbán sangat mengupayakan adanya reunifikasi budaya dan sosial antara Hungaria dan etnis Hungaria yang berada di luar teritorial wilayahnya. Hal ini dimanifestasikan dalam bentuk pengesahan undang-undang mengenai minoritas Hungaria di negara-negara tetangga yang memungkinkan seluruh keturunan etnis Hungaria dari perbatasan negara sebelum adanya Perjanjian Trianon untuk mengklaim kewarganegaraan Hungaria. Hingga saat ini, permasalahan mengenai etnis Hungaria masih menjadi masalah yang dihadapi oleh Hungaria dan Ukraina. Isu ini merupakan pemicu utama renggangnya hubungan bilateral kedua negara. Pada tahun 2014, Viktor Orbán memberikan seruan pidato agar etnis Hungaria di Ukraina diberikan kewarganegaraan ganda dan kesempatan untuk otonomi di

tengah aneksasi Rusia atas Krimea (Gardner, 2015). Hungaria bersikap berdasarkan kepentingan nasionalnya yang mengutamakan etnis Hungaria, bahkan hingga invasi Rusia ke Ukraina, dengan keyakinan akan keselamatan etnis Hungaria di tengah perang berlangsung.

Manifestasi *trianon syndrome* secara terbuka ditunjukkan melalui tindakan Viktor Orbán yang mengunggah peta sejarah ‘Greater Hungary’ di Facebook pada 6 Mei 2020. Unggahan tersebut berisikan pemberian ucapan semangat kepada siswa yang sedang melaksanakan ujian sejarah dengan tulisan “56. Az érettségizők történelmet írnak. Hajrá” yang diartikan menjadi “56. Para siswa sedang menulis sejarah. Lakukanlah” (Orbán Viktor, 2020). Unggahan Viktor Orbán disertai gambar bekas kawasan Hungaria sebelum berakhirnya Perang Dunia Pertama (Holroyd, 2020).



Gambar 3. 5 Unggahan Facebook Perdana Menteri Viktor Orbán

Sumber: Facebook.com

Sebelumnya, peta ‘Greater Hungary’ turut terlihat ketika Viktor Orbán mengadakan pertemuan kepresidenan Fidesz pada tahun 2019 (Sándor Zsíros, 2019). Peta tersebut dipasang di ruangan pemerintahan sebagai latar belakang mereka pada Gambar 3.6 di bawah. Adanya peta ‘Greater Hungary’ di kabinet resmi pemerintah mendapat kecaman dari Menteri Luar Negeri Slowakia dengan mengatakan bahwa orang-orang Slovakia, Rumania, Vojvodina Serbia, hingga Transcarpathia Ukraina sangat wajar dan memiliki hak untuk merasa paranoid (Balkan Insight, 2022).



Gambar 3. 6 Pertemuan kepresidenan Fidesz tahun 2019

Sumber: Twitter @EuroSandor

Simbol lain dari penggunaan *trianon syndrome* terlihat dari peta ‘Greater Hungary’ yang di pasang di kantor Zoltan Kovács—juru bicara pemerintah Hungaria—pada awal tahun 2022 (Toomey, 2022). Foto tersebut diambil ketika pemerintah Hungaria sedang melakukan pembuatan film dokumentar mengenai kebijakan Hungaria untuk mempromosikan keluarga dan mengendalikan imigrasi (The New Culture Forum, 2022). Hal ini semakin memperkuat adanya indikasi keinginan Hungaria untuk mencapai kembali ‘Greater Hungary’. Pada dasarnya, penggunaan simbol peta ‘Greater Hungary’ atau Kerajaan Hungaria secara resmi oleh Pemerintah Hungaria menimbulkan berbagai kecaman dari negara-negara tetangga yang mana teritorial mereka terlihat dalam peta tersebut. Hal ini dianggap sebagai tindakan yang mencederai kedaulatan negara lain di masa kini. Melihat bagaimana hubungan Hungaria dan Ukraina dalam beberapa

tahun terakhir, terutama pada isu minoritas, maka penggunaan simbol peta ‘Greater Hungary’ secara resmi semakin memperkeruh hubungan bilateral kedua negaranya.



Gambar 3. 7 Proses pembuatan film dokumenter

Sumber: Twitter @NewCultureForum

Parlemen Hungaria memperlihatkan tindakan simbolik yang mendukung manifestasi *trianon syndrome* dengan mengesahkan undang-undang yang menyatakan tanggal 4 Juni sebagai “Hari Persatuan Nasional.” Undang-undang ini disahkan pada 31 Mei 2010 dengan disetujui oleh dua pertiga mayoritas Partai Fidesz yang kemudian ditandatangani secara resmi pada 3 Juni 2010 oleh Presiden Republik László Sólyom. Pemilihan tanggal 4 Juni didasarkan pada hari penandatanganan Perjanjian Trianon tahun 1920 (Murber, 2019). Hari persatuan nasional dengan nama resmi *Nemzeti Összetartozás Napja* diadakan untuk memperingati hilangnya wilayah Hungaria akibat perjanjian tersebut. Dalam hal ini, hari besar yang diperingati setiap tanggal 4 Juni menjadi sebuah pengingat Hungaria akan

warisan bersama seluruh warga Hungaria, apapun kewarganegaraannya. Selain itu, hari tersebut diperingatkan sebagai pengingat bahwa seluruh etnis Hungaria merupakan bagian organik dari bangsa Hungaria, termasuk individu yang tinggal di luar perbatasan negara ibu (Zemplényi, 2022).

Simbolik yang diwakilkan oleh undang-undang hari persatuan nasional ini semakin diperkuat melalui monumen-monumen yang dibangun secara massal selama masa Pemerintahan Viktor Orbán untuk mengingat Perjanjian Trianon. Di tahun 2010, terdapat *nemzeti egység emlékműve* atau monumen persatuan nasional di wilayah Szenna. Monumen ini terbuat dari kayu berbentuk burung turul di atas dengan menggunakan pisau di kedua tangan. Monumen untuk memperingati hari kebangkitan ini turut menggunakan gambar peta ‘Greater Hungary’, simbol negara Magyar, simbol caturan Arpad, serta simbol Szenna, sementara terdapat tulisan di atas permukaan berwarna besi “*Hazádnak rendületlenül légy híve oh magyar*” atau bermakna “Setialah dengan teguh pada negaramu, wahai orang Hungaria.” Tulisan ini semakin mempertegas himbauan bagi seluruh orang Hungaria, dimana pun mereka berada, untuk setia dan berpegang teguh pada negara ibu mereka.



Gambar 3. 8 Monumen Persatuan Nasional di taman pusat desa Somogy

Sumber: Kozterkep.hu

Pada perayaan Hari Persatuan Nasional di tahun 2011, sebuah *Trianon-émlékmű* atau monumen Trianon didirikan di Kota Hatvan dengan makna uluran tangan-tangan yang diinterpretasikan sebagai etnis Hungaria, mencari satu sama lain di celah yang ditarik ke sana kemari oleh kekuatan yang ‘kuat’ atau kekuatan besar—menang dalam perang (Apollonia, 2011). Walikota Hatvan sekaligus anggota majelis nasional—Zsolt Szabó—memberikan pidato bahwa Hungaria memiliki kewajiban moral untuk mengingat apa yang terjadi di Trianon karena hal tersebut merupakan ‘trauma yang menimpa bangsa’ pada tahun 1920, demi keadilan nasional (Rita, 2011). Pernyataan Walikota Hatvan semakin memperkuat bahwa masyarakat Hungaria mengalami *trianon syndrome*.



Gambar 3. 9 Monumen Trianon di Hatvan

Sumber: Kozterkep.hu

Sementara itu, relief turut dibangun dalam upaya menyebarkan ingatan historis terhadap Perjanjian Trianon. Relief perunggu karya Lajos Györfi yang memaknai Trianon dalam bingkai batu kapur merah menggambarkan sebuah pohon yang separuh bagian pohon tersebut kehilangan akarnya, melambangkan bagaimana Hungaria saat ini kehilangan wilayah serta etnisnya. Relief ini diresmikan di sekitar sekolah dasar di Hajdúdorog (Tamás, 2013).



Gambar 3. 10 Relief di sekolah dasar di Hajdúdorog

Sumber: Kozterkep.hu

Dalam memperingati kesedihan akibat perjanjian Trianon 1920 selama 94 tahun, monumen István Vanyúr diresmikan pada 4 Juni 2014 di Kota Komló. Monumen tersebut berupa lempengan patung batu kapur yang berbentuk peta, makam, hingga prasasti yang melambangkan kesedihan atau kepahitan yang dirasakan akibat fragmentasi dan kebersamaan. Merujuk pada bentuknya, lempengan batu kapur tersebut membentuk peta Hungaria masa kini apabila dilihat dari atas, sementara dari tampak depan menunjukkan kontur tanah air Hungaria sebelum dekrit perdamaian Trianon (HegyhatMédia, 2014).



Gambar 3. 11 Monumen Persatuan Bangsa

Sumber: Kozterkep.hu

Monumen lainnya yang melambangkan *trianon syndrome* adalah *a nemzeti összetartozás emlékműve* atau monumen persatuan nasional. Monumen ini terletak di Örkény yang diinaugurasi pada 19 agustus 2020. Terdapat puisi tentang perjanjian trianon oleh Babits Mihály dengan judul

“Áldás a magyarra című” yang bermakna bahwa tanah air Hungaria selalu setara selama seribu tahun sebagai berikut.

*“A haza, a haza egyenlő volt mindig
ezer év óta már, és mindig az marad,
mert nem darabokból összetákolt darab:
egytest a mi hazánk, eleven valami!
Nem lehet azt csak úgy vagdalni, toldani”*

Bentuk dari monumen ini memiliki makna detail, terutama pada gabungan komposisi biji dan cangkang yang berbentuk bulat sebagai lambang kekuatan kohesif yang menyatukan masyarakat yang tinggal di Cekungan Carpathian selama ribuan tahun. Selain itu, pita warna-warni melambangkan keragaman budaya negara-negara terkait yang tinggal di sekitar Hungaria dan proyeksi cahayanya mewakili pengaruh timbal balik mereka (Erika, 2021).



Gambar 3. 12 Monumen Persatuan Bangsa

Sumber: Kozterkep.hu

Pada tahun yang sama, monumen peringatan Trianon didirikan di Kota Miskolc dengan bentuk tangan yang melambangkan persatuan nasional dan komitmen penduduk daerah tersebut terhadap Hungaria. Monumen ini diinagurasi pada 22 oktober 2020.



Gambar 3. 13 Monumen Peringatan Trianon

Sumber: Kozterkep.hu

Selain itu, ketika terjadi pandemi Covid-19 di seluruh dunia, Hungaria pada tahun 2020 mengeluarkan dana sebanyak \$17 juta untuk membangun tugu peringatan perjanjian Trianon dengan desain balok granit yang retak dan api abadi. Simbol ini melambangkan komitmen berkelanjutan Hungaria terhadap komunitasnya yang terfragmentasi. Tugu peringatan ini secara jelas sangat melambangkan *trianon syndrome* dalam pemerintahan Fidesz. Sepanjang 100 meter, para rakyat Hungaria—atau siapapun yang

berjalan di daerah tugu peringatan—dapat membaca nama-nama terukir dari hampir 13.000 permukiman di Hungaria yang merupakan kawasan sebenarnya dari Hungaria, salah satunya adalah kota-kota di Ukraina (Maltby, 2020).

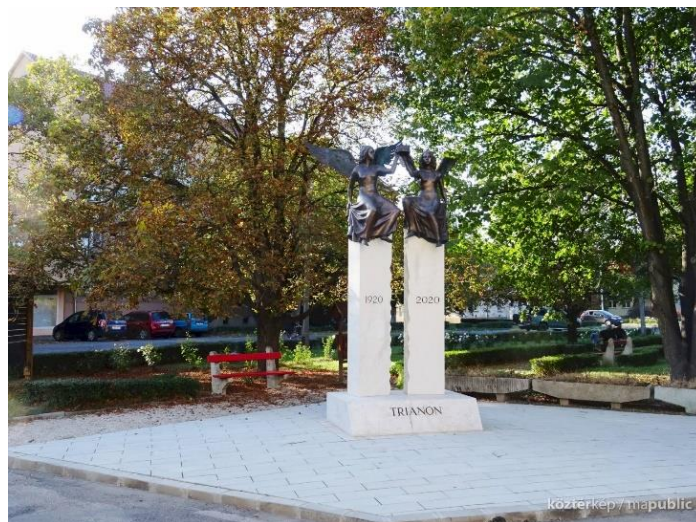


Gambar 3. 14 Lorong Jalan Trianon Memorial

Sumber: lovefromhungary.com

Monumen yang diberi nama Trianon Memorial, terletak di seberang gedung Parlemen Budapest. Secara implisit, Pembangunan monumen ini bertujuan untuk mengklaim seluruh wilayah Hungaria sebelum tahun 1920 sebagai agenda “solidaritas nasional” atau dalam bahasa Hungaria *Összetartozás*. Pengukiran nama-nama kota yang tertulis menggunakan nama kota di masa Kerajaan Hungaria dinilai sebagai upaya Magyarisasi yang tidak hanya berusaha memperbaiki masa lalu, melainkan turut menandai ruang yang dimilikinya dahulu sebagai tanah Magyar untuk masa depan (Berecz, 2021).

Monumen lainnya turut didirikan pada tahun 2021, seperti monumen Trianon di Jasz-Nagykun-Szolnok yang merepresentasikan dua malaikat memegang lambang Hungaria karya Mihaly Biro Lajos Munkácsy (lihat Gambar 3.15). Secara detail, salah satu malaikat yang di tengahnya sedang mengangkat mahkota Hungaria di atas wilayah Hungaria yang terkoyak yang diwakili oleh tiang-tiang yang rusak dan menyatukan mahkota Hungaria. Hal ini memaknai Perjanjian Trianon yang semakin jelas dengan adanya penelitian tahun-tahun di kolom monumen, 1920 - 2020, hingga terdapat kata Trianon.



Gambar 3. 15 Monumen Trianon di Jasz-Nagykun-Szolnok

Sumber: Kozterkep.hu

Di kota yang berbeda, patung lainnya dibentuk sebagai peringatan Trianon. Kota Nyíregyháza mendirikan patung dari perunggu antik setinggi empat setengah meter dengan diameter delapan meter dengan bentuk pohon yang cukup unik (lihat Gambar 3.16). Bentuk cakram pektoral mengacu pada pendahulu Hungaria dimana cakram tersebut pecah ketika

Hungaria terpecah belah akibat Trianon. Mereka bergabung bersama pohon dengan akarnya sebagai simbol yang menunjukkan cara baru bagi bangsa Hungaria untuk bangkit. Hal ini merepresentasikan kebangkitan Hungaria dari trauma Trianon dengan mempersatukan kembali etnis-etnis Hungaria yang berada di luar teritorial negaranya.



Gambar 3. 16 Monumen Trianon di Nyíregyháza

Sumber: Kozterkep.hu

Pada tahun 2023 di tengah peristiwa invasi Rusia ke Ukraina, Hungaria kembali membentuk monumen untuk memperingati Perjanjian Trianon. Hal ini ditandai dengan didirikannya patung yang menggambarkan motif kuno rusa ajaib di Újkígyós. Dalam upacara peresmian, Walikota Pál Botyánszki menyampaikan pidato bahwa rasa kepemilikan atas Hungaria melintasi perbatasan dalam perjalanan ke daerah-daerah yang terpisah dari Hungaria. Pál Botyánszki menyatakan bahwa etnis Hungaria memiliki sejarah dan nasib yang sama dengan

bagian-bagian bangsa Hungaria di luar perbatasan. Walikota menekankan bahwa orang Hungaria adalah milik bersama, di mana pun mereka tinggal. Maka dari itu, tugu peringatan Trianon menjadi simbol kebersamaan etnis Hungaria hingga akhir zaman sebagai upaya untuk menjalin kembali ikatan yang terkoyak 103 tahun lalu (Erzsébet, 2023).



Gambar 3. 17 Monumen rusa ajaib di Újkígyós
Sumber: Kozterkep.hu

Melihat rentang waktu pembuatan monumen peringatan Perjanjian Trianon yang terus dilakukan oleh Hungaria semakin menunjukkan bahwa *trianon syndrome* menjadi alasan utama atau faktor mendasar dari kepentingan nasional Hungaria dalam bertindak di dalam maupun luar negeri. Semakin banyaknya monumen-monumen yang dibangun dengan tujuan mengenang Perjanjian Trianon membuktikan bahwa Hungaria di

bawah pemerintahan Fidesz dan Viktor Orbán menggunakan pengalaman historis untuk menjalankan perannya di dunia internasional. Melalui tindakannya, Pemerintah Hungaria tidak mengeksploitasi trauma kolektif tentang Perjanjian Trianon untuk mencapai ‘Greater Hungary’ dengan menggambar ulang perbatasannya, melainkan kontrol terhadap minoritas Hungaria di luar teritorialnya atau beberapa peneliti lain mendefinisikannya sebagai suatu ekspansi budaya (Bottoni, 2020). Menurut Maltby (2020), kepemimpinan Viktor Orbán dan Partai Fidesz terlihat seperti aneksasi budaya karena cara berkabung atas peristiwa Trianon membuat agenda Hungaria untuk hegemoni budaya konservatif menjadi lebih eksplisit.

Lalu bagaimana keterkaitan antara simbol-simbol di atas dengan kebijakan Hungaria dalam merespons invasi Rusia ke Ukraina? Pembangunan monumen hingga penggunaan simbol-simbol yang erat kaitannya dengan Perjanjian Trianon, bahkan hingga di tahun 2023 ketika invasi sedang berlangsung, menjadi salah satu aspek yang mendukung argumen peneliti mengenai inkonsistensi Hungaria yang disebabkan oleh *trianon syndrome* selama masa pemerintahan Fidesz. Monumen-monumen yang dibangun tidak begitu berdampak signifikan karena dapat diasumsikan sebagai aksi mengenang sejarah. Namun, peneliti ingin menegaskan bahwa apa yang dilakukan Hungaria berbeda dengan ‘mengenang’ dalam artian biasa karena diikuti oleh upaya untuk

membangun kembali Hungaria seperti sedia kala, sebelum Peristiwa Trianon, melalui reunifikasi nasional.

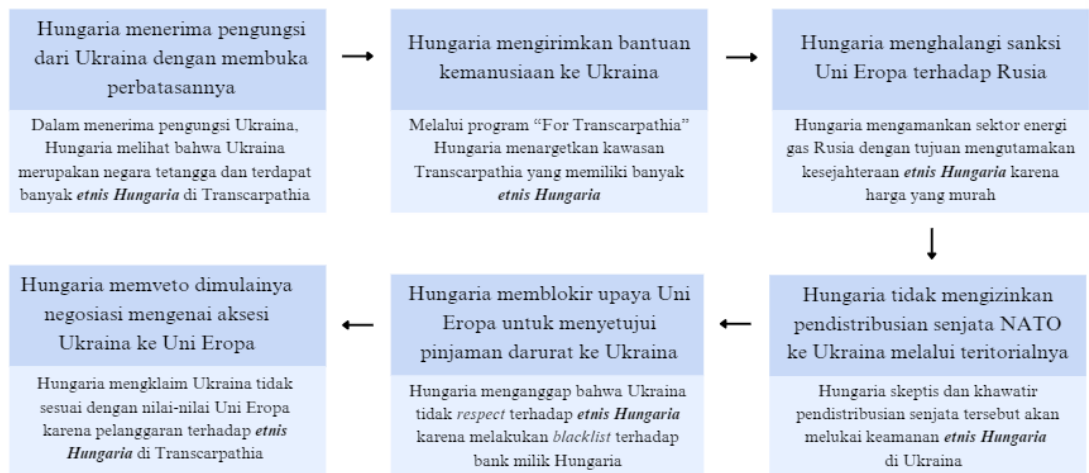
Melalui sambutan pada 100 tahun peringatan Trianon dengan meresmikan Trianon Memorial, Viktor Orbán menyatakan bahwa inventarisasi tersebut menandakan berakhirnya 100 tahun kesunyian Hungaria yang disebabkan oleh Trianon dan mendeklarasikan bahwa Hungaria tidak hanya akan bertahan hidup, melainkan mendapatkan kembali harga dirinya. Dengan adanya pembangunan monumen oleh Pemerintah Hungaria, rakyat Hungaria di dalam maupun di luar perbatasan semakin ‘terkoneksi’ dengan pengalaman historis mereka yang kemudian menciptakan peluang untuk mencapai ‘Greater Hungary’.

3.2 Manifestasi *Trianon Syndrome* Dalam Serangkaian Kebijakan Hungaria Pada Invasi Rusia ke Ukraina Tahun 2022 – 2023

Hungaria menjadi sorotan dunia internasional karena tindakannya yang tidak mencerminkan nilai-nilai Uni Eropa dalam menyikapi invasi Rusia ke Ukraina. Inkonsistensi kebijakannya yang kemudian dikategorikan sebagai tindakan ‘netral’ ini menggambarkan bahwa Hungaria tidak memihak siapapun dan bertindak atas dasar kepentingan nasional Hungaria. Dalam wawancara Viktor Orbán bersama dengan M1 News Channel, Perdana Menteri Hungaria secara langsung menyatakan bahwa prioritas Hungaria adalah kepentingan Hungaria dan warga Hungaria, bahkan pada masa perang sekali pun. Viktor Orbán turut menambahkan bahwa berbagai keputusan yang dipertimbangkan oleh

Hungaria akan selalu melayani kepentingan Hungaria dan warga Hungaria, “*When a decision has to be made, we need to find the one that best serves Hungarian interests, because **Hungary’s interests come first**, Hungary before else*” (Orbán, 2022).

Apabila dijabarkan dengan lebih mendetail menggunakan sudut pandang *strategic culture* yang dimiliki Hungaria, maka tindakan-tindakan Hungaria tersebut sejatinya hanya berpedoman pada satu dasar, yaitu pengalaman historis—Perjanjian Trianon 1920, yang kemudian menjadi pedoman dalam serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk mencapai ‘Greater Hungary’ dalam artian menyatukan kembali dan menghilangkan batas-batas perbatasan antara Hungaria sebagai negara di masa kini dengan bangsa Hungaria, termasuk etnis Hungaria di Ukraina. Tak hanya itu, *trianon syndrome* menjadikan Hungaria untuk mendapatkan kembali harga dirinya di dunia internasional. Maka dari itu, kebijakan-kebijakan Hungaria dalam menanggapi invasi Rusia ke Ukraina yang dikategorikan sebagai posisi yang ‘unik’ karena inkonsistensi Hungaria disebabkan oleh *trianon syndrome*. Berikut adalah bagan manifestasi *trianon syndrome* dalam kebijakan Hungaria dalam menanggapi invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022 – 2023.



Gambar 3. 18 Bagan Alur Motivasi Kebijakan Hungaria Terhadap Invasi Rusia ke Ukraina Tahun 2022 – 2023
Sumber: Olahan Peneliti

Berdasarkan Gambar 3.17 yang telah diolah peneliti dengan berkaca pada tindakan Hungaria ke Ukraina diketahui bahwa perubahan kebijakan Hungaria tersebut tidak memengaruhi motivasi utamanya, yaitu perlindungan terhadap minoritas etnis Hungaria di Ukraina. ‘Etnis Hungaria’ menjadi kata kunci dalam manifestasi *trianon syndrome*. Serangkaian kebijakan Hungaria yang dinilai inkonsisten antara pro-Uni Eropa dan tidak pro-Uni Eropa tersebut sejalan dengan kepentingan nasional Hungaria yang lahir dari trauma terhadap peristiwa Trianon tahun 1920. Trauma ini digunakan oleh Pemerintahan Fidesz untuk ‘bangkit’ kembali sehingga Hungaria dapat dikatakan berani melakukan serangkaian tindakan kontra dengan sekutu negara-negara Barat dalam Uni Eropa maupun NATO.

Perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Hungaria berfokus pada ‘peluang’ sehingga terjadi penyesuaian strategi, taktik, atau metode yang digunakan Pemerintahan Fidesz untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri yang telah ditetapkan sejak kepemimpinannya. Hal ini sejalan dengan nilai politik yang dipegang oleh pemimpin Hungaria, yaitu keluarga, bangsa, dan Tuhan. Kata ‘bangsa’ merujuk pada etnis Hungaria dimana pun mereka berada. Apabila dikaji lebih lanjut, perasaan *victimhood* atau menjadi korban berhasil dipolitisasi oleh elit politik Hungaria sehingga menjustifikasi segala tindakan yang tercermin sebagai keinginan untuk ‘balas dendam’ terhadap pihak Barat dan ‘bangkit’ dari kekalahan melalui serangkaian tindakan yang lebih agresif dan defensif. Dalam hal ini, *strategic culture* tersebut mendorong Hungaria mendefinisikan ancaman sebagai suatu hal yang tidak sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Maka dari itu tindakan yang terkesan lebih defensif dan agresif tersebut dilakukan guna menjaga integritas teritorial dan kedaulatan Hungaria di tengah situasi perang, sama halnya seperti yang disampaikan oleh Pemerintah Fidesz dalam GIS Report (2023). Dalam hal ini, Upaya Viktor Orbán dan Partai Fidesz yang berusaha untuk melakukan unifikasi nasional merupakan salah satu cara Hungaria menyikapi dan bangkit dari perjanjian Trianon tahun 1920. Tindakan ini merupakan manifestasi dari *trianon syndrome* yang turut dijadikan sebagai Keputusan strategis dalam menyikapi perang Rusia dan Ukraina sehingga

menimbulkan tindakan inkonsistensi Hungaria antara pro-Uni Eropa dan tidak pro-Uni Eropa.